

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor public adalah jenis akuntansi yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Di Indonesia reformasi pengelolaan keuangan Negara telah memasuki tahap transparansi maupun laporan kualitas laporan keuangan. Pencapaian hasil kinerja dan instansi pemerintah, menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan bidang pemerintah dalam implementasinya, sehingga dapat diketahui melalui informasi tentang laporan keuangan di masing-masing instansi pemerintah tersebut. Dengan adanya informasi terkait laporan keuangan, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik lagi

Disuatu daerah kualitas pelayanan public menjadi perhatian bersama, karena dengan peningkatan kualitas pelayanan bagi public penting dilakukan pemerintah untuk mencapai kepuasan kerja pada masyarakat. Para pejabat public, unsur-unsur pada masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan public. Sebagaimana dari yang kita ketahui, sektor public memiliki tujuan utama yaitu suatu pemberian pelayanan public (*public service*) bukan untuk memaksimalkan laba. Tetapi hingga saat ini belum diketahui apakah sesungguhnya pelayanan yang akan diterima rakyat sebagai warga Negara dan bagaimana seharusnya pemerintah menyelenggarakan pelayan public (Reni dkk, 2019).

Akuntabilitas public merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang telah mereka lakukan kepada pihak pemberi amanah yang berhak untuk

meminta pertanggung jawaban (Mardiasmo 2009). Oleh sebab itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, relevan, dapat dipercaya dan konsisten. Oleh karena itu dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat dari instansi pemerintah akan memberikan dampak positif bagi instansi tersebut (Widaryanti & Nurul, 2018).

Dengan penerapan akuntansi sektor public yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah maupun daerah diharapkan akan dapat memperbaiki kinerja SKPD sehingga penyelenggaraan atau urusan-urusan pemerintah dapat optimal.

Dengan adanya otonomi daerah pengelolaan daerah keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi dan pengawasan internal yang merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana kualitas laporan keuangan dengan sistem desentralisasi secara transparan , efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan (Novandina. A. 2020).

Menurut Kadarisman,(2013), bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018) pengawasan adalah tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pemimpin. Untuk itu kadang-kadang pemimpin perlu meninjau kembali kebijaksanaan atau keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan –tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control (simbolon, 2013).

Dalam kenyataannya fenomena yang terjadi saat ini masih banyak laporan keuangan yang disusun tidak berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang tidak memperoleh opini yang diperoleh oleh Skpd atau pemerintah daerah kabupaten sumba tengah

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novandalina Arini (2020) “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada seluruh skpd kabupaten sumba tengah ”. Berdasarkan penelitian ini, Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi yang mempunyai pengawasan internal yang baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa pegawai bagian akuntansi/keuangan pada skpd atau pemerintah daerah kabupaten sumba tengah , telah memahami proses akuntansi sampai

menjadi laporan keuangan sehingga tujuan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nazar (2013) “Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan penerapan akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang N0. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Tidak terkecuali pada seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah selaku Daerah otonomi juga dituntut harus mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang ditetapkan dan diminta pertanggungjawaban oleh pemerintah pusat.

Dalam menyampaikan laporan realisasi anggaran SKPD mengacu pada laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabannya kepada SKPD setiap bulannya, laporan tersebut yang menjadi dasar SKPD untuk menyusun laporan realisasi anggaran berkala.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka dokumen perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya sebagai penjabaran rencana kerja tahunan telah di susun Renja-SKPD dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Susunan kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut:

Berdasarkan latar belakang dari atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul“ **Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah** ”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari atas , maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: pengaruh penerapan akuntansi sektor public dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah ?

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi prsoalan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah ?
2. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor public terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Dan juga sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan ke depannya yang lebih baik.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan dan pengembangan wawasan dan pengetahuan ekonomi, khususnya pemahaman tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor public dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah kabupaten sumba tengah bagi mahasiswa ekonomi, dan juga menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.